

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA GIRIKARTO**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PUNGUTAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GIRIKARTO;**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a | Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Girikarto dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa; |
|  |  | b | Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), Pemerintah Desa Girikarto perlu memaksimalkan hasil Pendapatan Asli Desa (PAD); |
|  |  | c | Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b),maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Desa Girikarto tentang Pungutan Desa; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015; |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 ); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. | Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Derah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2016 tentang RenCana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girikarto (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 2);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 6);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2017 Nomor 3);  Peraturan Desa Girikarto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 4). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIKARTO

Dan

KEPALA DESA GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

1. Dalam Peraturan desa ini yang di maksud deangan :
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat,berdsarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan republic indonesia.
7. Pemerintah desa adalah penyelengara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistim Pemerintahan Negara kesatuan republic indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala desa dan Perangkat desa unsure penyelenggara Pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan permusyawaratan yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah desa.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah adalah suatu sistim pembagian keuangan yang adil,proposional,demokratis dan transparan.
13. Dana perimbangan keuangan Kabupaten dan desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran dan pendapatan belanja daerah yang di alokasikan kepada desa untuk pembiayaan kebutuhan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD serta di tetapkan dengan peraturan daerah.
15. Alokasi Dana desa yang selanjutnya di sebut ADD adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang selanjutnya di sebut APBDes adalah rencana keuangan tahuan desa yang di bahas dan di setujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah Pertauran yang di buat oleh BPD bersama Kepala desa.
18. Musyawarah pembangunan Desa yang selanjutnya di sebut Musrenbangdes adalah purum musyawarah tahunan stikholder Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
19. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber pengahasilan bagi Desa yang bersangkutan.
20. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarajkat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri menadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhasn yang dapat dirasakan kelompok masyarakat tersebut.
21. Gotong royong adalah bentuk keja sama yang di laksanakan secara spontan dan suka rela antara warga desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatat.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan usaha yang didirikan dan di kelola oleh Desa.
23. Bendahara desa adalah kepala urusan keuangan Desa dan atau staf Sekretaris desa yang di angkat dan di tetapkan dengan Keputusan kepala desa untuk melaksanakan penatausahaan keunagan Desa.

**Pasal 2**

Agar Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis pungutan desa dan ketentuan besarnya biaya pungutan.

**Pasal 3**

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

**Pasal 4**

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Dengan belakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Girikarto

Pada tanggal, 21 November 2018

**KEPALA DESA GIRIKARTO**

TUYADI

Diundangkan di Girikarto

Pada tanggal, 21 November 2018

**SEKRETARIS DESA**

**SUPARMAN**

LEMBARAN DESA GIRIKARTO TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PUNGUTAN** | **BESARNYA (Rp )** | **KETERANGAN** |
| 1 | Karcis Pasar | 1.000 | Umum |
| 2 | Karcis Pasar | 2.000 | Pedagang |
| 3 | Legalisasi Kridit Bank | 0 |  |
| 4 | Surat Keterangan Potong Sapi | 0 |  |
| 5 | Surat Keterangan Kematian | 0 |  |
| 6 | Surat Keterangan Belum Nikah | 0 |  |
| 7 | Legalisasi Ijin Bangunan Permanen | 0 |  |
| 8 | Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan | 0 |  |
| 9 | Legalisasi Surat-surat Keterangan Lainya | 0 |  |
| 10 | Surat Keterangan Pindah Tempat/penduduk | 0 |  |
| 11 | Surat Keterangan Kelahiran Anak | 0 |  |
| 12 | Surat Keterangan Penduduk Baru | 0 |  |
| 13 | Surat Keterangan KK Baru | 0 |  |
| 14 | Surat Keterangan Mencari KTP | 0 |  |
| 15 | Surat Keterangan Pindah Tempat | 0 |  |
| 16 | Surat Keterangan Jalan | 0 |  |
| 17 | Surat Keterangan Kelakuan Baik/SKCK | 0 |  |
| 18 | Surat Keterangan Bebas G 30 S/PKI | 0 |  |
| 19 | Surat Keterangan Mencari SIM C dan A | 0 |  |
| 20 | Surat Keterangan Mencari KK | 0 |  |
| 21 | Surat Keterangan Wali nikah | 0 |  |
| 22 | Surat Keterangan Nikah | 0 |  |
| 23 | Surat Keterangan Talak | 0 |  |
| 24 | Surat Keterangan Rapak | 0 |  |
| 25 | Surat Keterangan Numpang Nikah | 0 |  |
| 26 | Sidang Peralihan Hak Satas Tanah | 25.000 | Per bidang |
| 27 | Sidang Warisan Pembagian Tanah | 25.000 | Per bidang |
| 28 | Sidang Jual beli tanah | 250.000 | Perbidang |
| 29 | Biaya Persiapan Program PTSL | 140.000 | Perbidang |
| 31 | Sidang Pembagian Tanah hibah | 25.000 | Perbidang |
| 32 | Surat Keterangan Tanggungan Keluarga | 0 |  |
| 33 | Surat Keterangan Tidak Mampu/Beasiswa | 0 |  |
| 34 | Surat Ijin Rapat Organisasi | 0 |  |
| 35 | Ijin Keramaian Siang-malam | 0 |  |
| 36 | Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) | 0 |  |
| 37 | Ijin Usaha ( HO ) | 0 |  |
| 38 | Dana Legalisasi KP.4 | 0 |  |
| 39 | Dana Legalisasi Surat Kuasa | 0 |  |
| 40 | Dana Imunisasi Calon Manten | 0 |  |
| 41 | Dana Legalisasi Wesel | 0 |  |
| 42 | Dana Legalisasi Paket | 0 |  |
| 43 | Dana Pembangunan Desa | 0 |  |
| 44 | Dana Pembangunan Padukuhan | 0 |  |
| 45 | Sewa Molen Desa | 75.000 | Per hari |
| 46 | Sewa Kios Desa ( Wiloso ) | 750.000 | Per Tahun |
| 47 | Sewa Kios Desa ( Munggur Wiloso ) | 1.000.000 | Per Tahun |
| 48 | Sewa kios Desa ( Padem ) | 500.000 | Per Tahun |
| 49 | Sewa Kios Desa ( Gesing ) | 1.000.000 | Per Tahun |
| 50 | Sewa Kursi Balai Desa | 1.000 | Per biji |
| 51 | Sewa Lahan di lokasi Pantai Gesing | 50.000 | Per meter/Tahun |
| 52 | Sewa Gedung Pertemuan Pantai Gesing | 200.000 | Per hari (24 jam) |
| 53 | Sewa Lahan di lokasi Pantai Kesirat | 25.000 | Per meter/Tahun |
| 54 | Sewa Gedung Balai Desa ( kosong ) | 200.000 | Umum |
| 55 | Sewa Lapangan Desa | 150.000 | Per hari (24 jam) |
| 56 | Sewa Los Pasar Padem | 25.000 | Per meter/Tahun |
| 57 | Sewa Kios Gesing | 500.000 | Per Tahun |
| 58 | Sewa Lokasi untuk Kegiatan Organisasi/Shoting/dll | 150.000 | Per hari (24 jam) |
| 59 | Sewa Lahan untuk Dinas lain | 500.000 | Per Tahun |
| 60 | Bea Masuk Kawasan Pantai Grigak | 2.000 | Per orang |
| 61 | MCK Desa di lokasi wisata | 2.000 | Per pakai |
| 62 | Jasa Parkir Wisata | 2.000 | Roda 2 |
| 63 | Jasa Parkir Wisata | 5.000 | Roda 4 |
| 64 | Jasa Parkir Wisata | 10.000 | BUS |

Girikarto, 21 November 2018

KEPALA DESA GIRIKARTO

TUYADI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PUNGUTAN** | **BESARNYA (Rp )** | **KETERANGAN** |
| 1 | Karcis Pasar | 1.000 | Umum |
| 2 | Karcis Pasar | 2.000 | Pedagang |
| 3 | Legalisasi Kridit Bank | 0 |  |
| 4 | Surat Keterangan Potong Sapi | 0 |  |
| 5 | Surat Keterangan Kematian | 0 |  |
| 6 | Surat Keterangan Belum Nikah | 0 |  |
| 7 | Legalisasi Ijin Bangunan Permanen | 0 |  |
| 8 | Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan | 0 |  |
| 9 | Legalisasi Surat-surat Keterangan Lainya | 0 |  |
| 10 | Surat Keterangan Pindah Tempat/penduduk | 0 |  |
| 11 | Surat Keterangan Kelahiran Anak | 0 |  |
| 12 | Surat Keterangan Penduduk Baru | 0 |  |
| 13 | Surat Keterangan KK Baru | 0 |  |
| 14 | Surat Keterangan Mencari KTP | 0 |  |
| 15 | Surat Keterangan Pindah Tempat | 0 |  |
| 16 | Surat Keterangan Jalan | 0 |  |
| 17 | Surat Keterangan Kelakuan Baik/SKCK | 0 |  |
| 18 | Surat Keterangan Bebas G 30 S/PKI | 0 |  |
| 19 | Surat Keterangan Mencari SIM C dan A | 0 |  |
| 20 | Surat Keterangan Mencari KK | 0 |  |
| 21 | Surat Keterangan Wali nikah | 0 |  |
| 22 | Surat Keterangan Nikah | 0 |  |
| 23 | Surat Keterangan Talak | 0 |  |
| 24 | Surat Keterangan Rapak | 0 |  |
| 25 | Surat Keterangan Numpang Nikah | 0 |  |
| 26 | Sidang Peralihan Hak Satas Tanah | 25.000 | Per bidang |
| 27 | Sidang Warisan Pembagian Tanah | 25.000 | Per bidang |
| 28 | Sidang Jual beli tanah | 250.000 | Perbidang |
| 29 | Biaya Persiapan Program PTSL | 140.000 | Perbidang |
| 31 | Sidang Pembagian Tanah hibah | 25.000 | Perbidang |
| 32 | Surat Keterangan Tanggungan Keluarga | 0 |  |
| 33 | Surat Keterangan Tidak Mampu/Beasiswa | 0 |  |
| 34 | Surat Ijin Rapat Organisasi | 0 |  |
| 35 | Ijin Keramaian Siang-malam | 0 |  |
| 36 | Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) | 0 |  |
| 37 | Ijin Usaha ( HO ) | 0 |  |
| 38 | Dana Legalisasi KP.4 | 0 |  |
| 39 | Dana Legalisasi Surat Kuasa | 0 |  |
| 40 | Dana Imunisasi Calon Manten | 0 |  |
| 41 | Dana Legalisasi Wesel | 0 |  |
| 42 | Dana Legalisasi Paket | 0 |  |
| 43 | Dana Pembangunan Desa | 0 |  |
| 44 | Dana Pembangunan Padukuhan | 0 |  |
| 45 | Sewa Molen Desa | 75.000 | Per hari |
| 46 | Sewa Kios Desa ( Wiloso ) | 750.000 | Per Tahun |
| 47 | Sewa Kios Desa ( Munggur Wiloso ) | 1.000.000 | Per Tahun |
| 48 | Sewa kios Desa ( Padem ) | 500.000 | Per Tahun |
| 49 | Sewa Kios Desa ( Gesing ) | 1.000.000 | Per Tahun |
| 50 | Sewa Kursi Balai Desa | 1.000 | Per biji |
| 51 | Sewa Lahan di lokasi Pantai Gesing | 50.000 | Per meter/Tahun |
| 52 | Sewa Gedung Pertemuan Pantai Gesing | 200.000 | Per hari (24 jam) |
| 53 | Sewa Lahan di lokasi Pantai Kesirat | 25.000 | Per meter/Tahun |
| 54 | Sewa Gedung Balai Desa ( kosong ) | 200.000 | Umum |
| 55 | Sewa Lapangan Desa | 150.000 | Per hari (24 jam) |
| 56 | Sewa Los Pasar Padem | 25.000 | Per meter/Tahun |
| 57 | Sewa Kios Gesing | 500.000 | Per Tahun |
| 58 | Sewa Lokasi untuk Kegiatan Organisasi/Shoting/dll | 150.000 | Per hari (24 jam) |
| 59 | Sewa Lahan untuk Dinas lain | 500.000 | Per Tahun |
| 60 | Bea Masuk Kawasan Pantai Grigak | 2.000 | Per orang |
| 61 | MCK Desa di lokasi wisata | 2.000 | Per pakai |
| 62 | Jasa Pelayanan umum | 3.000 | Per Orang |
| 63 | Jasa Parkir Wisata | 2.000 | Roda 2 |
| 64 | Jasa Parkir Wisata | 5.000 | Mobil |
| 65 | Jasa Parkir Wisata | 10.000 | Mini Bus |
| 66 | Jasa Parkir Wisata | 20. 000 | BUS |
| 67 | Jasa Parkir Wisata | 10.000 | Engkel |
| 68 | Jasa Parkir Wisata | 20.000 | Truk |

Girikarto, 21 November 2018

KEPALA DESA GIRIKARTO

TUYADI

**PERATURAN KEPALA DESA GIRIKARTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA GIRIKARTO NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG PUNGUTAN DESA**